



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DR. I WAYAN ARTHA DIPA,SH,MH
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 70858

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.613.470.000

1. Tanah Seluas 1.070 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 185.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 582 m2/70 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 158.050.000
3. Tanah Seluas 10.150 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 50.750.000
4. Tanah Seluas 2.230 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 286.600.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 355.200.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/154 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 149.770.000
8. Tanah Seluas 1.465 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
9. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 301.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000



2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 258.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 368.410.937

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.540.980.937

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.540.980.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.